

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu karakteristik dalam Negara Kesatuan seperti Indonesia adalah adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia banyak mengalami perkembangan dengan selalu berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Adanya otonomi urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang kompleks dalam pelaksanaannya, meskipun terkadang tujuan utama otonomi daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat agar lebih mudah sering tersisihkan oleh kepentingan elit politik (Muhammad Rijal, 2011 : 1).

Salah satu dampak dari merebaknya semangat otonomi di Indonesia adalah dengan banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran untuk menjadi daerah otonom baru yang mempunyai pemerintahan tersendiri. Fenomena pemekaran daerah yang semakin ramai ini menimbulkan ragam argumentasi, yakni untuk mempermudah jarak jangkauan masyarakat terhadap urusan administrasi. Pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan baik apabila pemerintahan yang melaksanakan kewenangan otonomi itu telah siap untuk mengemban tanggung jawab. Dalam melakukan pemekaran daerah ada beberapa persyaratan yang harus

dimiliki oleh daerah. Secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi tidak terlalu sulit. Di era otonomi daerah, hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab banyak daerah yang melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi (Muhammad Rijal, 2011 : 2).

Desentralisasi dan pemekaran terlalu sering dipandang sebagai mekanisme-mekanisme bebas masalah dari pembaharuan pemerintahan, bagian dari suatu transisi menuju struktur-struktur tata pemerintahan yang sudah ditetapkan dan yang menyumbang pada pembangunan, demokrasi dan masyarakat sipil. Begitu pula, aktor-aktor politik sendiri cenderung mengemas proses-proses yang kompleks yang saling berkaitan itu dengan ungkapan-ungkapan mekanistik rutin yang tentu saja didasarkan pada visi dan misi pembangunan dan berakar pada aspirasi-aspirasi masyarakat (Nordholt, 2007 : 154).

Pengaturan pemekaran daerah diapresiasi dengan muncul daerah otonom baru dengan metode pemekaran, yakni penggabungan daerah atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah. Ketersediaan peluang bagi pemekaran daerah otonom atau pembentukan daerah otonom baru, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia (Muhammad Rijal, 2011 : 2). Keinginan masyarakat dan politik di Luwu membentuk satu provinsi tersendiri sudah bermula sejak puluhan tahun lalu. Ketika masih hidup Raja (Datu atau Pajung'e Ri Luwu), Andi Djemma, ia pernah menemui Presiden R.I, Ir. Soekarno pada tahun 1958. Ia meminta kepada Presiden R.I satu Pemerintahan Daerah Istimewa

di Luwu, namun hingga Datu Andi Jemma wafat pada tanggal 23 Februari 1965 cita-citanya belum terwujud (Azhar Mustamin Toputiri, 2007: 1).

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Munculnya gejala, bahkan kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan kabupaten, kota dan propinsi baru di Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat-syarat dan kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam pembentukan dan pemekaran daerah, karena untuk menjadikan sebuah kabupaten, kota dan provinsi harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam UU dan direkomendasikan atas persetujuan Pemerintah Pusat. (Nordholt, 2007 : 155).

## **B. Analisis Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Konflik antara Masyarakat Luwu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam usaha pembentukan atau Pemekaran Provinsi Luwu tahun 1999-2006.
2. Perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu dalam usaha pemekaran Provinsi Luwu tahun 1999-2006.

3. Penolakan Pemerintah Pusat (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) dalam menanggapi Pembentukan atau Pemekaran Provinsi Luwu bagi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosio-kulturalnya.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini memiliki obyek yang jelas maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini pembahasan penulis terbatas pada perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu dalam usaha pemekaran Provinsi Luwu tahun 1999-2006.

## **3. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas kembali inti permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan suatu rumusan masalah. Melalui rumusan masalah ini diharapkan akan lebih mudah dalam memahami dan menyusun penelitian kepada tahap-tahap selanjutnya. Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu dalam usaha pemekaran Provinsi Luwu tahun 1999-2006?

## **C. Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu dalam usaha pemekaran Provinsi Luwu tahun 1999-2006.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi penulis mengenai perkembangan sejarah politik dalam masalah perjuangan yang dilakukan Masyarakat Luwu di daerah Luwu Sulawesi Selatan dalam usaha pemekaran dari sebuah kabupaten menjadi sebuah provinsi.
2. Sebagai suplemen materi pada mata kuliah Sejarah Nasional Kontemporer, yaitu pembahasan mengenai bentuk suatu perjuangan dalam usaha pemekaran provinsi.

## 3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Tipe penelitian : Analisis Kualitatif
2. Metode penelitian : Metode Historis dan Dokumentasi
3. Subjek penelitian : Perjuangan Masyarakat Luwu
4. Objek penelitian : Pemekaran Provinsi Luwu
5. Tempat penelitian : 1. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah  
2. Perpustakaan Universitas Lampung  
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung
6. Waktu Penelitian : tahun 2012
7. Tahun Temporal : tahun 1999-2006
8. Bidang ilmu : Sejarah Politik

## REFERENSI

Muhammad Rijal. 2011. *Pemekaran Daerah Melahirkan Masalah*. <http://rijal-akay.blogspot.com/2011/10/pemekaran-daerah-melahirkan-masalah.html>.diakses jumat, 12 Juli 2013. 11.05 WIB.

Henk Schulte Nordholt,dkk. 2007. *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.Halaman 154

Muhammad Rijal.*Op.Cit*.Halaman 2

Azhar Mustamin Toputiri. 2007. *Perjuangan Provinsi Luwu*. <http://azhartoputiri.blogspot.com/2007/08/gema-luwu-raya.html>.diakses Rabu, 6 Februari 2013.10.15 WIB.

Henk Schulte Nordholt,dkk.*Op.Cit*.Halaman 155